

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Literatur Review

Literatur Review merupakan uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang ingin diteliti. Literatur review digunakan untuk meninjau kembali pustaka-pustaka atau tulisan terdahulu yang terkait dengan tema yang sedang dibahas. Literatur review dilakukan guna untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi ekspor udang Indonesia ke Jepang setelah diberlakukannya IJEPA. Informasi yang di dapat harus bersifat relevan, berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis berupa artikel, buku, *slide*, informasi dari internet, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi dan berita-berita resmi. Berikut merupakan beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas:

**Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu	Keterangan
<p><b>Topik:</b></p> <p>1. <i>Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)</i>, oleh A Komala, 2008.</p>	<p>Dalam jurnal nya tersebut, A Komala menjelaskan tentang latar belakang diberlakukannya IJEPA, ada langkah baru dalam hubungan Jepang dan Indonesia, yakni dengan terbentuknya hubungan ekonomi melalui kerja sama bilateral dalam peningkatan kapasitas liberalisasi, baik di bidang jasa maupun di bidang barang, promosi dan fasilitas perdagangan, dan investasi di antara kedua negara. serta dijelaskan tentang materi pokok isi dari perjanjian dalam IJEPA.</p>
<p><b>Kelebihan</b></p>	<p>Tidak hanya membahas latar belakang terbentuknya IJEPA, dalam jurnalnya A Komala menjelaskan secara lengkap tentang materi pokok isi dari perjanjian IJEPA</p>
<p><b>Kekurangan</b></p>	<p>Dalam jurnal tersebut kurang dapat dipahami penjelasan di setiap isi perjanjiannya, sebab bahasa yang dipakai sulit dipahami, terlebih pada bagian peraturan tambahan (<i>annexes</i>).</p>
<p><b>Posisi/Pembaharuan</b></p>	<p>Persamaan jurnal A Komala dengan penelitian ini yaitu memiliki persamaan latar belakang masalah yang membahas Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dan menjadikan jurnal tersebut menjadi acuan untuk membahas perjanjian yang telah ditetapkan dalam program IJEPA.</p>
<p><b>Topik:</b></p> <p>2. “Kerjasama Ekonomi Indonesia – Jepang Melalui <i>Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)</i>” oleh Binar Sudiby, 2016</p>	<p>Dalam penelitian skripsinya Binar menjelaskan tentang bagaimana hubungan perdagangan Indonesia – Jepang Sebelum Kerjasama IJEPA dilaksanakan dan hubungan perdagangan Indonesia – Jepang setelah IJEPA dilaksanakan.</p>

<b>Kelebihan</b>	Dalam skripsinya, Binar menjelaskan adanya perbedaan antara sebelum dan setelah dilaksanakannya IJEPA dalam kerjasama Indonesia dengan Jepang, disajikan dalam bentuk data angka serta tahun yang jelas.
<b>Kekurangan</b>	Perbedaan dari sebelum diadakannya IJEPA tidak begitu terlihat signifikan, hanya disebutkan secara umum saja. Sehingga kurang terlihat untuk perbandingannya.
<b>Posisi/Pembaharuan</b>	Memiliki persamaan pembahasan tentang bagaimana program IJEPA dapat membawa peningkatan terhadap nilai ekspor Indonesia ke Jepang dalam sektor perdagangan. Peneliti menjadikannya sebagai salah satu sumber acuan dalam melakukan penelitian
<b>Topik:</b>  3. “Implementasi <i>Indonesia Japan Economic Partnership Agreement</i> pada ekspor komoditas udang dan Tuna dalam Sektor perikanan Indonesia” oleh Derliana, 2011.	Dalam penelitian skripsinya, Derliana menjelaskan implementasi dari IJEPA melalui perjanjian-perjanjian yang sudah berlaku dengan ditandatanganinya IJEPA ini dapat menjadi keuntungan khusus untuk sektor perikanan
<b>Kelebihan</b>	Penulis mendorong untuk departemen kelautan dan perikanan harus terus menyebarkan informasi tentang IJEPA, apa dan bagaimana teknisnya kepada para pelaku usaha agar mereka dapat memanfaatkan kerjasama ini secara maksimal.
<b>Kekurangan</b>	Dalam skripsinya, Derliana lebih mendominasi pembahasan tentang kendala-kendala dalam implementasi IJEPA, tidak banyak disebutkan apa saja kontribusi Jepang dalam membantu meningkatkan kualitas dan ekspor hasil perikanan Indonesia.
<b>Posisi/Pembaharuan</b>	Berdasarkan penelitian skripsi Derliana, peneliti menjadikannya sebagai salah satu sumber acuan dalam melakukan penelitian, karena memiliki persamaan pembahasan tentang ekspor udang Indonesia dalam implementasi IJEPA, khususnya kondisi ekspor udang Indonesia dan produk udang Indonesia ke Jepang.

### 2.1.1. Kerangka Teoritis/Konseptual

Dalam mempermudah proses penelitian ini peneliti membutuhkan teori-teori serta konsep yang sesuai dengan tema agar penelitian terarah. Dalam tinjauan pustaka ini akan dijelaskan beberapa teori dan konsep yang dipakai peneliti agar penelitian lebih dapat dipahami. Kerangka teoritis berfungsi sebagai dasar argumentasi agar dapat menjawab pertanyaan penelitian serta landasan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti. Teori paling mendasar yang peneliti gunakan yakni teori Hubungan Internasional.

Hubungan Internasional berlangsung sangat dinamis, dimana berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan (alam). Pada awal proses perkembangannya, sejumlah pakar berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Mengutip dari pendapat Schwarzenberger bahwa ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Jadi ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olah raga), atau pertukaran budaya (*cultural exchange*). (Perwita & Yani, 2005: 1)

Saat ini Hubungan Internasional merupakan cabang atau disiplin ilmu pengetahuan yang paling muda dan sedang berkembang. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional

merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2005: 4) Pengertian Hubungan Internasional menurut Banyu Perwita dalam bukunya “Pengantar Hubungan Internasional” sebagai berikut: “Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu.” (perwita & Yani, 2014)

Dalam melakukan hubungan internasional terdapat beberapa interaksi antar negara-negara, interaksi tersebut dapat berbentuk perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional. Pasca perang dingin, hubungan antar negara lebih erat dengan banyaknya negara yang melakukan hubungan internasional melalui kerjasama internasional.

Menurut **K. J. Holsti**, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a) **Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.**
- b) **Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.**
- c) **Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.**
- d) **Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.**
- e) **Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.**  
(repository.unpas.ac.id n.d.)

Hakekat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negara memiliki sifat universal guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifat internasional. Bentuk interaksi kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antara negara, seperti kerja sama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara (Perwita dan Yani, 2005:28). Dalam proses hubungan bilateral di tentukan tiga motif, yaitu: Memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, meningkatkan kesejahteraan ekonomi (perwita & yani 2005)

Kebijaksanaan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa untuk mewujudkan suatu kepentingan nasional, menurut Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai *explicit and of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial*

*boundries*. Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melawati batas kewilayahan negara. Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri. (Sandi 2017:2)

Salah satu aspek kebijakan diantaranya dalam bidang ekonomi maupun politik. Menurut Mohtar Mas' oed dalam bukunya Ekonomi – Politik Internasional dan Pembangunan, mendefinisikan tentang Ekonomi Politik Internasional sebagai berikut: "...tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antar "negara" dan "pasar", antara lingkungan domestik dengan yang internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat... ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan; sedang politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi". (Moctar Mas' oed 2003)

Untuk mendukung pembangunan suatu negara dalam bidang ekonomi yaitu industrialisasi. Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*). Dalam istilah ekonomi,

industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (W.Hanum n.d.)

Industrialisasi menurut Edi Suwandi Hamid dalam bukunya *Industrialisasi* yaitu: “Industrialisasi adalah proses percepatan pertumbuhan produksi barang yang dilaksanakan di dalam negeri, yang diimbangi dengan pertumbuhan yang serupa di bidang permintaannya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar”. (Edi Suwandi Hamid 1990) Toto Hadikusumo (1990) pengertian industri adalah: “Suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang (produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir), termasuk disini memasang bahagian dari suatu barang (*assembling*).

Ketika satu negara telah mencapai tahapan dimana sektor industri sebagai *leading sector* maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi (Yustika, 2000). Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja (Chenery, 1986). Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi



dengan sektor industri pengolahan sebagai *leading sector*. Berdasarkan pengalaman di hampir semua negara, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun. (W.Hanum n.d.)

Menurut Mubyarto (1989), ilmu ekonomi pertanian adalah termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu kemasyarakatan (*social science*), ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya serta hubungan antar manusia. Perilaku yang dipelajari bukanlah hanya mengenai perilaku manusia secara sempit, misalnya perilaku petani dalam kehidupan pertaniannya, tetapi mencakup persoalan ekonomi lainnya yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran dan konsumsi petani atau kelompok-kelompok petani. Pengertian ekonomi pertanian yang demikian maka analisis usahatani beserta pengolahan hasil-hasil pertanian, kebijakan pertanian, hukum-hukum dan hak-hak pertanahan termasuk bidang-bidang yang harus dipelajari oleh ekonomi pertanian. Sehingga dapat didefinisikan bahwa ilmu ekonomi pertanian sebagai bagian dalam ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik mikro maupun makro. Menurut analisis klasik dari Kuznets (1964) dalam Tambunan (2003), pertanian di LDCs dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, yaitu sebagai berikut:

- a. Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat bergantung pada pertumbuhan output di sektor pertanian, baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasokan makanan yang kontinue mengikuti pertumbuhan penduduk, maupun dari sisi penawaran sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur (misalnya industri makanan dan minuman) dan perdagangan. Kuznets menyebut ini sebagai kontribusi produk.
- b. Di negara-negara agraris seperti Indonesia, pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor lainnya. Kuznets menyebutnya kontribusi pasar.
- c. Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain itu, menurut teori penawaran tenaga kerja tak terbatas dari Arthur Lewis dan telah terbukti dalam banyak kasus, bahwa dalam proses pembangunan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja dari pertanian (pedesaan) ke industri dari sektor-sektor perkotaan lainnya. Kuznets menyebutnya kontribusi faktor-faktor produksi.
- d. Sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (sumber devisa) baik, lewat ekspor hasil-hasil pertanian maupun dengan peningkatan produksi pertanian dalam negeri menggantikan impor (substitusi impor). Kuznets menyebutnya kontribusi devisa. (Ririn Aristiyani 2017:21)

Daya saing merupakan kemampuan suatu komoditas untuk memasuki pasar luar dan kemampuan untuk dapat bertahan dalam pasar tersebut dalam artian jika suatu produk mempunyai daya saing maka produk tersebutlah yang banyak diminati oleh banyak konsumen. Pada dasarnya daya saing diperlukan untuk

meningkatkan standar dan kualitas barang serta untuk meningkatkan eksistensi ekonomi menjadi lebih berorientasi pasar. Selanjutnya, daya saing adalah untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan efisiensi secara teknis dalam proses produksi. Pengertian daya saing yang lebih luas dikemukakan oleh *World Economic Forum* (WEF) yang mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Menurut Michael E. Porter (1990), daya saing diidentikkan dengan produktivitas di mana tingkat output yang dihasilkan untuk setiap unit input yang digunakan. Peningkatan produktivitas meliputi peningkatan jumlah input fisik (modal dan tenaga kerja), peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (total faktor produktivitas). (Ririn Aristiyani 2017:33)

Menurut Christianto (2013) Pengertian perdagangan internasional secara sederhana menurut kamus ekonomi yaitu perdagangan yang terjadi antara dua negara atau lebih. Perdagangan luar negeri merupakan aspek penting bagi perekonomian suatu negara. Perdagangan internasional menjadi semakin penting tidak hanya dalam pembangunan negara yang berorientasi keluar akan tetapi juga dalam mencari pasar di negara lain bagi hasil-hasil produksi di dalam negeri serta pengadaan barang-barang modal guna mendukung perkembangan industri di dalam negeri. Perdagangan internasional diawali dengan pertukaran atau perdagangan tenaga kerja dengan barang dan jasa lainnya. Dasar dalam perdagangan internasional adalah adanya perdagangan barang dan jasa antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan ini terjadi apabila terdapat permintaan dan penawaran pada pasar internasional. (M.Idham Sofyan 2017:11) Terdapat beberapa hal yang mendorong terjadinya

perdagangan internasional diantaranya dikarenakan perbedaan permintaan dan penawaran antar negara. Perbedaan ini terjadi karena: (a) tidak semua negara memiliki dan mampu menghasilkan komoditas yang diperdagangkan, karena faktor-faktor alam negara tersebut tidak mendukung, seperti letak geografis serta kandungan buminya dan (b) perbedaan pada kemampuan suatu negara dalam menyerap komoditas tertentu pada tingkat yang lebih efisien.(Ririn Aristiyani 2017)

Teori Daya saing yang merupakan kemampuan suatu komoditas untuk memasuki pasar luar dan kemampuan untuk dapat bertahan dalam pasar tersebut dalam artian jika suatu produk mempunyai daya saing maka produk tersebutlah yang banyak diminati oleh banyak konsumen. Pada dasarnya daya saing diperlukan untuk meningkatkan standar dan kualitas barang serta untuk meningkatkan eksistensi ekonomi menjadi lebih berorientasi pasar. Selanjutnya, daya saing adalah untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan efisiensi secara teknis dalam proses produksi. Pengertian daya saing yang lebih luas dikemukakan oleh *World Economic Forum* (WEF) yang mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Menurut Michael E. Porter (1990), daya saing diidentikkan dengan produktivitas di mana tingkat *output* yang dihasilkan untuk setiap unit *input* yang digunakan. Peningkatan produktivitas meliputi peningkatan jumlah input fisik (modal dan tenaga kerja), peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (total faktor produktivitas).(Ririn Aristiyani 2017)

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis perlu mengemukakan inti dari permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adanya upaya dari setiap negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, upaya yang dilakukan Indonesia yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Jepang melalui *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. IJEPA yaitu: “IJEPA adalah sebuah kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi antara Indonesia dan Jepang. IJ-EPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinjo Abe” (Susana Puspa Dewi 2013)

Kepentingan ekonomi dalam politik luar negeri Jepang terhadap Indonesia. Jepang dan Indonesia memiliki hubungan ekonomi dan politik yang kuat satu sama lain. Bagi Jepang, Indonesia merupakan partner dagang yang penting karena Indonesia memiliki pasar yang sangat potensial untuk industri ekspor Jepang. Adanya hubungan ekonomi politik yang erat ini Jepang berusaha menjadikan Indonesia sebagai partner dagang melalui kerjasama *Economic Partnership Agreement* (EPA) dalam skema *Free Trade Agreement* (FTA). FTA atau Perjanjian Perdagangan Bebas merupakan perjanjian antara negara-negara dimana mereka sepakat untuk menghapus sebagian atau semua tarif, kuota, biaya khusus dan pajak, serta hambatan lain untuk perdagangan antar negara. Tujuan FTA adalah membentuk sekaligus memperlancar perdagangan dan investasi dengan mencapai persetujuan dengan mitra dagang dan investor secara cepat maupun mantap karena serangkaian alasan yang seperti alasan secara geografis.

FTA merupakan salah satu bentuk pasar liberal antar negara untuk mampu melakukan perdagangan secara terbuka dan bebas sedangkan pemerintah bekerja untuk memberikan kerangka peraturan. FTA membuat batas-batas antar negara menjadi lebih mudah untuk ditembus karena adanya kemudahan dalam melakukan perdagangan. *Economic Partnership Agreement* (EPA) merupakan salah satu skema FTA yang merupakan perjanjian kerjasama ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai macam kebijakan seperti pengurangan atau penghapusan tarif impor, peningkatan kerjasama dalam bidang investasi, dan peningkatan program-program pembangunan bagi industri dan sumber daya manusia di kedua belah pihak. Berbeda dengan FTA yang menitikberatkan pada pengurangan atau penghapusan tarif, EPA menawarkan perjanjian kerjasama yang lebih luas yaitu dengan investasi yang lebih dapat menguntungkan bagi kedua negara. (Yohana Meinar Adityarini 2013:4)

Kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang salah satu nya di implementasikan pada kegiatan ekspor, ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor suatu negara terjadi karena adanya manfaat yang diperoleh akibat transaksi perdagangan luar negeri. Perdagangan juga dapat memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara serta membantu berbagai usaha untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan peranan sektor yang mempunyai keunggulan komperatif karena efesiensi dalam faktor produksi. Nopirin menyatakan bahwa ekspor berasal dari suatu produksi dalam negeri dijual dipakai oleh penduduk luar negeri, maka ekspor merupakan injeksi kedalam aliran pendapatan seperti halnya investasi. Salah satu komponen dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor,

sering disebut juga sebagai komponen pembangunan utama (export-led-development) artinya ekspor memegang peranan utama dan signifikan terhadap proses pembangunan suatu bangsa. (Ibnu Syeh Fajar 2013:3)

Impor adalah pengusaha atau lembaga-lembaga nonpemerintah yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual lagi ke dalam negeri. Kegiatan impor ini dilakukan jika harga barang yang bersangkutan di luar negeri lebih murah, harga yang lebih murah tersebut antara lain karena negara penghasil mempunyai sumber daya alam yang lebih banyak, negara penghasil bisa memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah, dan negara penghasil biasa memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak.

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output yang lebih tinggi, lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan (JhinganM.L,2000). Selain menambah peningkatan produksi barang untuk dikirim ke luar negeri, ekspor juga menambah permintaan dalam negeri, sehingga secara langsung ekspor memperbesar output industri-industri itu sendiri, dan secara tidak langsung permintaan luar negeri mempengaruhi industri untuk mempergunakan faktor produksinya, misalnya modal, dan juga menggunakan metode-metode produksi yang lebih murah dan efisien sehingga harga dan mutu dapat bersaing dipasar perdagangan internasional.(Karunia Saputri 2016)

Subsektor perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Menurut Badan Pusat Statistika dalam Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009, yang termasuk dalam subsektor perikanan adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting), moluska dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar.

Subsektor Perikanan mencakupi:

- a. Pengembangan industri perikanan tuna terpadu, termasuk inisiasi dan pengembangan awal budidaya tuna untuk menghasilkan tuna segar
- b. Pengembangan industri tambak udang terpadu, termasuk pembangunan broodstock, balai benih, revitalisasi backyard hatchery, pabrik pakan dan pos kesehatan ikan
- c. Pengembangan pabrik industri rumput laut terpadu dan massal di daerah produsen di seluruh Indonesia, serta pabrik pengolahan bahan kering menjadi *semi-refined products* di pusat-pusat industri
- d. Peningkatan stok perikanan perikanan tangkap
- e. Pembenihan dan pemijahan perikanan budidaya (Ririn Aristiyani 2017)

Berdasarkan data dan teori di atas, dapat ditarik beberapa asumsi yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan dikaji penulis adalah sebagai berikut:



1. Dengan berlangsungnya kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jepang maka akan dapat memenuhi kepentingan kedua negara tersebut.
2. Dengan disepakatinya perjanjian kerjasama dalam bidang ekonomi antara Indonesia dengan Jepang yaitu adanya penurunan bea masuk tarif sebagai bentuk dari liberalisasi yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.
3. Dengan adanya kerjasama IJEPA diharapkan dapat membawa peningkatan terhadap hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Jepang.
4. Selain peningkatan ekspor, diharapkan adanya bantuan lain dari Jepang untuk meningkatkan perkembangan industri perikanan Indonesia.

## 2.2. Preposisi/Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka teoritis di atas, penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

**“Jika kerjasama Indonesia-Jepang dalam kerangka IJEPA melalui 3 pilar EPA (liberalisasi akses pasar, fasilitas, serta kerjasama melalui *capacity building* atau sektor-sektor industri prioritas) dapat direalisasikan serta adanya kemudahan syarat ekspor, maka ekspor perikanan Indonesia terutama produk udang Indonesia ke Jepang akan meningkat, hal ini ditandai dengan meningkatnya volume ekspor dan devisa negara”**

### 2.3. Verifikasi Variabel dan Indikator

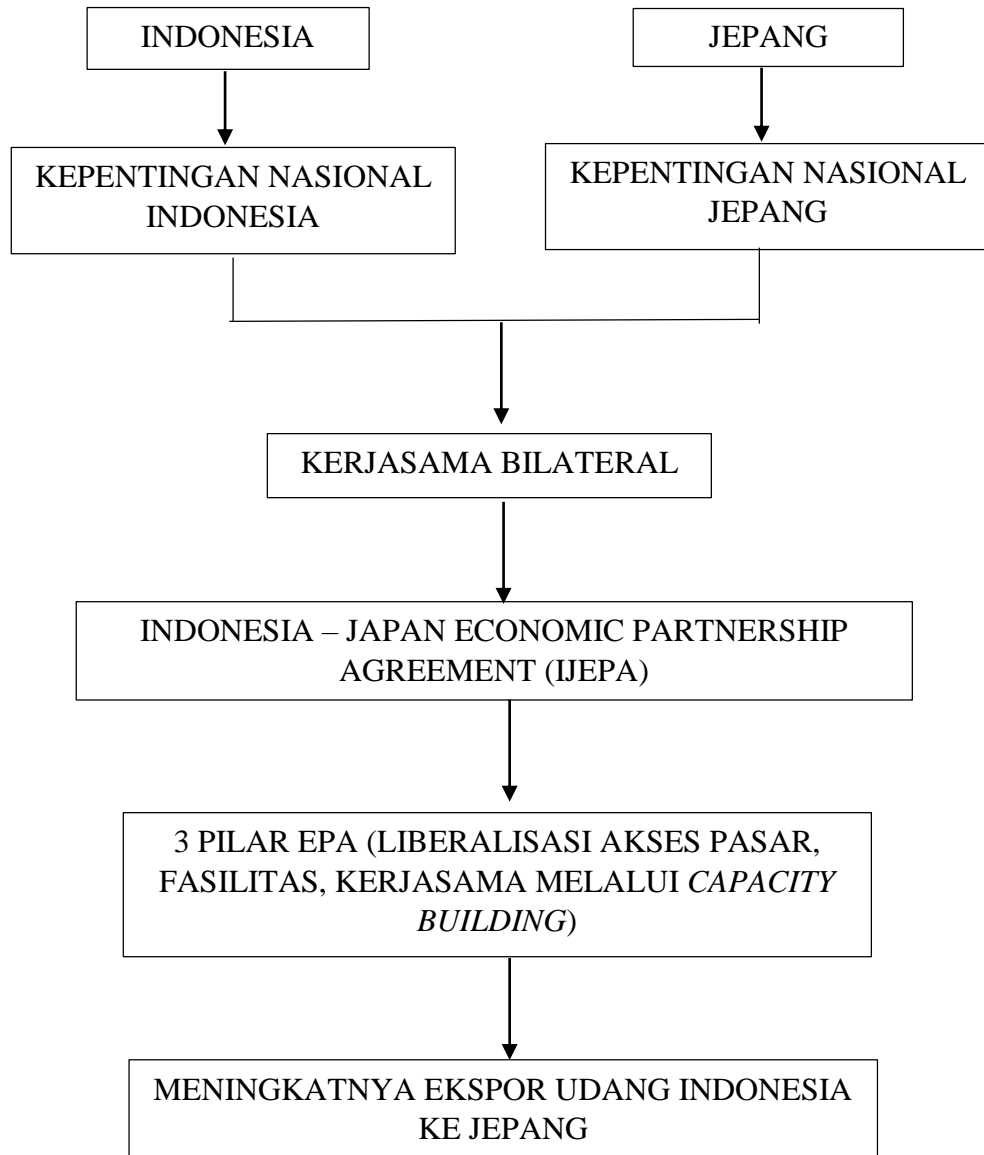
Berikut adalah tabel variabel dan indikator data:

**Tabel 3.2 Variabel dan Indikator**

Variabel (konsep Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi
Variabel Bebas: <i>Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)</i>	Mempererat kerjasama dalam menghadapi era perdagangan dan pasar bebas, pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat untuk menyusun suatu perjanjian kemitraan bilateral, yang dikenal dengan <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i> .	Kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang dalam <i>Indonesia – Economic Partnership Agreement (IJEPA)</i> ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2008 (entry into force) <a href="http://ditjenppi.kemendag.go.id">http://ditjenppi.kemendag.go.id</a>
Variabel Terikat: Pengaruhnya terhadap ekspor udang Indonesia ke Jepang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan Indonesia-Jepang semakin baik</li> <li>2. Bertambahnya volume ekspor dan devisa negara</li> <li>3. Ekspor udang Indonesia ke Jepang meningkat</li> </ol>	Data (fakta dan rangka) mengenai peningkatan ekspor udang Indonesia ke Jepang. <a href="https://kkp.go.id">https://kkp.go.id</a>

## 2.4. Skema dan Alur Penelitian

**Alur pemikiran kerjasama ekonomi *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* dan pengaruhnya terhadap ekspor udang Indonesia ke Jepang**



**Gambar 2.1 Skema Kerangka Teoritis**